

NASKAH FINAL
JUMAT 9 Juli
Jam 11.30



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2009-2010**

SENIN, 12 JULI 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2009-2010**

SENIN, 12 JULI 2010

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat bertemu kembali di dalam forum Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, sejumlah Anggota Dewan yang terdiri dari seluruh unsur fraksi telah menandatangani daftar hadir dan menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, izinkan kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009-2010 ini. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Sebelum kami memulai pidato pembukaan ini, kami beritahukan adanya satu surat masuk yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan, yaitu surat dari Presiden RI No. R-48/Pres/06/2010 penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. Surat dari Presiden RI tersebut akan diproses sesuai Tata Tertib DPR-RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masa Persidangan IV dimulai pada hari ini, tanggal 12 Juli 2010 dan akan ditutup pada tanggal 30 Juli 2010 nanti. Dengan demikian, Masa Persidangan IV akan berlangsung selama 15 hari kerja, atau 19 hari kalender. Sedangkan Reses Persidangan IV akan dimulai tanggal 31 Juli sampai 15 Agustus 2010, dengan perkiraan reses selama 10 hari.

Masa Persidangan IV yang relatif singkat, Dewan akan menangani tiga tugas utama Dewan, yaitu tugas di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Secara khusus, tugas legislasi akan mendapatkan prioritas, mengingat untuk tahun 2010 diprogramkan akan menyelesaikan Tujuh puluh (70) RUU, sementara baru lima (5) RUU yang telah diselesaikan oleh Dewan.

Tugas di bidang anggaran, lebih ditekankan kepada Badan Anggaran yang akan melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, untuk memenuhi ketentuan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dewan juga akan melakukan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Semester II BPK-RI tahun 2009, dan membahas hasil kunjungan kerja komisi-komisi dalam reses Persidangan III. Dalam rangka penetapan pejabat publik, Dewan akan memproses lebih lanjut pencalonan Gubernur Bank Indonesia yang telah disampaikan oleh Presiden dengan surat tertanggal 31 Mei 2010. Tugas ini akan ditangani oleh Komisi XI.

Juga menindaklanjuti Surat Presiden tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencalonan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (DEWAS LPPRI) Periode 2010-2015 (5 orang dari 15 calon), yang diserahkan penanganannya kepada Komisi I.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Masa Sidang ini, Dewan akan lebih fokus untuk melakukan pembahasan beberapa RUU. Ada 2 (dua) RUU baru yang disampaikan oleh Pemerintah, yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Teknik Militer dan RUU tentang

Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. Kedua RUU tersebut akan ditangani oleh Komisi I.

RUU lain yang datang dari Pemerintah yang akan segera dibahas oleh DPR-RI adalah; RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komisi I); RUU tentang Grasi (Komisi III); RUU tentang Keimigrasian (Komisi III); RUU tentang Informasi Geospasial (Komisi VII); RUU tentang Akuntan Publik (Komisi XI); RUU tentang Transfer Dana (Pansus); RUU tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pansus).

RUU dari DPR yang akan dilanjutkan pembahasannya dalam Masa Persidangan IV adalah: RUU tentang Protokol (Pansus) dan RUU tentang Mata Uang (Komisi XI).

RUU-RUU lain yang diusulkan oleh Baleg dan komisi-Komisi Dewan, dan telah disetujui oleh Rapat paripurna untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut yaitu: RUU tentang Holtikultura; RUU tentang Bantuan Hukum; RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; RUU tentang Cagar Budaya; RUU tentang Kepramukaan; RUU tentang Perumahan dan Permukiman.

Kinerja Dewan di bidang Legislasi terus mendapat sorotan negatif, karena belum maksimalnya penanganan yang telah dilakukan oleh Dewan. Oleh karena itu, Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Baleg sepakat untuk melakukan terobosan dalam mengatasi masalah ini, antara lain dengan pengalokasian ulang penjadwalan RUU dalam rapat-rapat Dewan, pengetatan pembatasan waktu pada saat penyiapan maupun pada saat pembahasan RUU, serta memaksimalkan para tenaga ahli dan *legal drafter* untuk mengoptimalkan fungsi legislasi, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk membantu persiapan penyusunan naskah akademik dan hal-hal yang bersifat legal. Karena ketatnya Masa Sidang IV yang berlangsung hanya 15 hari, maka Pimpinan dewan meminta komitmen para anggota Dewan dan Pimpinan-pimpinan fraksi, komisi/Pansus yang menangani RUU untuk benar-benar fokus terhadap penyelesaian berbagai RUU yang telah menjadi prioritas.

Dewan tidak saja menargetkan jumlah/kuantitas RUU yang dihasilkan sesuai prioritas, namun juga harus tetap menjaga kualitas agar RUU yang akan menjadi UU memiliki manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk jangka panjang. Sejumlah kasus *judicial review* dan pembatalan UU yang terjadi pada akhir-akhir ini,

merupakan pelajaran penting dan berharga, dan seharusnya menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kinerja Dewan di bidang legislasi, meminimalisir dilakukannya uji materi di MK. Dapat kami informasikan, perkembangan penanganan perkara di MK sebagai berikut:

- Perkara luncuran tahun 2009 (TMT Oktober 2009), jumlah perkara sebanyak 35, jumlah UU yang diuji sebanyak 29, dan jumlah perkara yang diputus sebanyak 21 perkara;
- Perkara tahun 2010, jumlah perkara sebanyak 40, jumlah UU yang diuji sebanyak 25, jumlah perkara yang diputus sebanyak 6 perkara.

UU yang diujimaterikan antara lain: UU No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Untuk itu, kehadiran tim kuasa hukum DPR RI dalam sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi perlu ditingkatkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan perlu melanjutkan tugas Tim-Tim yang sudah dibentuk DPR-RI seperti Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam DPR-RI, Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket DPR-RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century, Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Khusus Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket DPR-RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century, Dewan melalui Tim Pengawas mendesak ketiga institusi penegak hukum, Polri, Kejaksaan, dan KPK, untuk terus melakukan tindak lanjut penanganan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 3 Maret 2010.

Ketiga institusi hukum tersebut perlu membuat konstruksi hukum dan *time frame* tindak lanjut penanganan kesimpulan dan rekomendasi DPR-RI, sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ketiga institusi penegak hukum juga diminta menyampaikan

progress report tindak lanjut penanganan kesimpulan dan rekomendasi DPR-RI secara periodik kepada Tim Pengawas DPR-RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di antara berbagai masalah di dalam negeri yang menjadi perhatian Dewan adalah persoalan **data kependudukan**. Dewan mendorong Pemerintah agar Sistem Administrasi Kependudukan dapat diaplikasikan secara baik dengan menjamin adanya perencanaan yang efisien, efektif, dan akurat, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pemanfaatan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dibentuknya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2009. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan selesai pada tahun 2011 dan *electronic*-KTP (e-KTP) akan selesai pada tahun 2012, sehingga pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 tidak akan ada lagi permasalahan DPT.

Selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan Administrasi Kependudukan, Dewan meminta kepada Pemerintah untuk tidak melakukan pungutan dan pembiayaan terhadap pengurusan dokumen kependudukan, pemutakhiran data, penerbitan NIK, dan penerbitan *e-KTP*. Selain itu, dengan jumlah dana yang sangat besar, dalam rangka SIAK ini, pemerintah juga sudah seharusnya memperhatikan kelengkapan data bagi setiap penduduk dalam SIAK tersebut. Antara lain, menyangkut kewajiban perpajakan (PPH dan PBB) termasuk riwayat yang bersangkutan, sehingga setiap saat dapat diketahui status anggota masyarakat tersebut termasuk riwayat hidup sebelumnya.

Berkaitan dengan **pembentukan Daerah Otonom Baru**, Dewan merasa prihatin dengan masih adanya berbagai masalah. Komisi II DPR akan meningkatkan pengawasan dengan meminta kepada Pemerintah/Kementerian Dalam Negeri untuk menyerahkan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB) yang secara eksplisit menyebutkan nama daerah dan peringkat keberhasilannya.

Selanjutnya, Pemerintah perlu menyempurnakan kriteria dan persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru yang kemudian diatur secara detail dalam revisi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus dikaitkan dengan revisi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dewan berharap *Grand Design* Daerah Otonom Baru yang akan dibuat, dapat menjadi acuan penataan daerah di Indonesia untuk jangka panjang dengan memperhatikan keunikan dan potensi yang dimiliki setiap daerah.

Dewan juga menaruh perhatian terhadap **permasalahan desa**, ditandai dengan maraknya berbagai demo perangkat desa yang mendesak Pemerintah dan DPR untuk mengangkat mereka menjadi PNS. Permasalahan ini perlu disikapi secara bijaksana, namun perlu dilakukan pengujian lebih lanjut, baik berkaitan dengan kualitas pelayanan aparat desa maupun terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

RUU tentang Pemerintahan Desa dan RUU tentang Pembangunan Perdesaan, oleh DPR-RI masa kerja tahun 2004-2009 telah dibahas sejak tahun 2007, bahkan telah dibentuk Pansus di DPR-RI. Tetapi, sampai akhir masa jabatan anggota DPR-RI periode 2004-2009, RUU dimaksud gagal ditetapkan sebagai UU. Namun demikian, atas desakan berbagai komponen masyarakat dan mengingat urgensi mengenai permasalahan desa ini, DPR-RI periode sekarang menetapkan bahwa RUU tentang Desa dimasukkan dalam tambahan prioritas untuk tahun 2010. RUU ini sedang disiapkan oleh pemerintah.

Dalam RUU tersebut, nantinya akan diatur antara lain mengenai; Kewenangan desa; peraturan desa; keuangan desa; badan usaha milik desa; kerjasama desa; lembaga kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan; termasuk mengenai perangkat desa.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan **Pemilu Kepala Daerah (PemiluKada)** yang telah dan akan berlangsung sepanjang tahun 2010 ini, Dewan meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan melakukan tindakan pengawasan yang *signifikan*, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran PemiluKada, seperti *money politics*, penyimpangan oleh penyelenggara, penyalahgunaan kewenangan oleh *incumbent*, kecurangan DPT, dan sebagainya.

Banyaknya sengketa hasil PemiluKada mengharuskan Bawaslu untuk memantapkan mekanisme hubungan dan tata kerjanya dengan KPU, Instansi Penegak Hukum dan pihak-pihak terkait, agar pengawasan dan penanganan pelanggaran berjalan dengan optimal. Melalui kesiapan teknis pelaksanaan di lapangan, kita berharap potensi konflik yang senantiasa menghantui pelaksanaan PemiluKada tidak terjadi, sehingga seorang kepala daerah akan dapat dipilih oleh rakyat melalui dinamika kehidupan demokrasi yang semakin kondusif.

Masih berkaitan dengan masalah politik dalam negeri, Dewan bisa memahami timbulnya wacana untuk memberikan **hak pilih bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk Pemilu 2014**. Wacana ini diyakini dapat mengundang pro dan kontra dengan berbagai argumentasi masing-masing.

Kalangan Dewan dan berbagai komponen masyarakat berpendapat bahwa masalah hak pilih TNI untuk tahun 2014 terlalu dini untuk dibicarakan saat ini. Dewan masih sangat mengharapkan, bahwa TNI harus menjaga netralitas di dalam Pemilu agar kondisi keamanan tetap terjaga pada saat persiapan maupun dilaksanakannya proses Pemilu di Indonesia. Oleh karenanya, maka masalah ini tidak perlu dimasukkan di dalam revisi UU Pemilu yang segera akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Perlu diketahui bahwa secara resmi TNI tidak lagi terlibat di parlemen sebagaimana diamanatkan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Fraksi TNI sudah tidak ada lagi sejak DPR-RI Periode 2004-2009.

Permasalahan lain yang juga tak lepas dari perhatian Dewan adalah persoalan aset negara pada umumnya, **diantaranya aset negara di kawasan Senayan (Gelora Bung Karno) dan Kemayoran**. Panja Aset-Aset Negara Komisi II DPR-RI, menilai ada indikasi kerugian negara pada pemanfaatan aset-aset negara di kedua lokasi ini. Oleh karena itu, Dewan mendukung secara politis kepada Pusat Pengelola Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran dalam melakukan peninjauan ulang kerjasama (re-negosiasi) dengan pihak ketiga, agar memberi manfaat yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dalam re-negosiasi perjanjian-perjanjian, perlu adanya *legal standing* perjanjian yang standar dan proporsional sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dewan minta kepada pengelola untuk tetap menjamin adanya fasilitas publik yang terjangkau dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Penegakan hukum menjadi salah satu perkara besar yang tidak henti-hentinya mengundang kritik, baik dari kalangan Dewan, lembaga swadaya masyarakat, pakar hukum maupun komponen masyarakat lainnya. Masih adanya sinyalemen tentang “tebang pilih” dalam penanganan kasus-kasus hukum, masih saja terjadi “kecolongan” aparat penegak hukum dalam kasus-kasus cekal bagi mereka yang terkena masalah hukum, dan berbagai kasus lain masih sangat memprihatinkan. Penegakan hukum yang lugas tanpa pandang bulu harus benar-benar ditegakkan.

Hari-hari ini pun, Dewan masih menunggu hasil Panitia Seleksi Pimpinan KPK untuk menyiapkan **calon-calon terpilih Ketua KPK** yang akan diajukan ke DPR. Untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia yang tidak juga menunjukkan tren menurun, untuk Ketua KPK, kita perlu memilih figur yang terbaik dari calon-calon terbaik yang diajukan Panitia Seleksi (*the right person on the right place*).

Selain KPK, Dewan mengingatkan agar Komisi Yudisial dan Pemerintah segera menyiapkan calon Komisioner untuk menggantikan anggota Komisi Yudisial yang pada bulan Agustus mendatang akan berakhir masa tugasnya. **Komisi Yudisial** merupakan lembaga yang tidak boleh dkecilkan artinya, karena lembaga tersebut merupakan salah satu amanat dari perubahan UUD 1945.

Berbagai pendapat tentang kiprah **Satgas Mafia Hukum** yang telah dibentuk oleh Presiden beberapa bulan yang lalu, kalangan Dewan berharap agar keberadaan Satgas Mafia Hukum tidak tumpang tindih, apalagi mengintervensi pelaksanaan tugas aparat penegak hukum lainnya. Untuk itu, diperlukan adanya transparansi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 26 tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satpol PP, kalangan Dewan tidak setuju diberikannya senjata api untuk melaksanakan tugas. Dewan menilai bahwa, Satpol PP belum matang secara psikologis sehingga penggunaan senjata akan sangat membahayakan. Ketentuan ini perlu dikaji ulang, Komisi II akan membahasnya bersama Pemerintah pada masa sidang ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam bidang kesejahteraan sosial, kita perlu memberi perhatian khusus pada **penanganan eks pengungsi Timor Timur (Tintim)**, dimana ribuan warga eks

pengungsi Timtim di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga kini masih mengalami penderitaan dan belum mendapatkan bantuan sosial yang memadai. Masalah pengungsi Timtim bukan saja mencakup masalah politik, namun juga masalah sosial dan kemanusiaan, di antaranya menyangkut kebutuhan dasar warga yang selama ini belum terpenuhi dengan baik. Hingga sekarang, banyak warga eks pengungsi Timtim yang kehidupannya sangat memprihatinkan, padahal mereka adalah korban konflik politik negara. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, banyak di antara mereka yang dulunya adalah orang-orang yang pro-integrasi (pro-Indonesia).

Dengan kondisi yang ada sekarang, banyak eks pengungsi Timtim yang merasa tersingkir di negerinya sendiri. Mereka hidup dalam penampungan yang tidak layak, serta sulit mendapatkan pekerjaan. Bahkan sebagian dari mereka mengalami marginalisasi dan terancam terusir dari tempat tinggalnya, karena pemilik tanah tak mengizinkan lagi mereka di sana. Sehubungan dengan ini Dewan berpendapat, Pemerintah perlu membuat kebijakan dan program-program yang memadai untuk membantu dan memberdayakan warga eks pengungsi Timtim terutama bagi mereka yang mengaku bertanah air Indonesia, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari warga negara Indonesia yang perlu dilindungi dan dibantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Masalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) juga menjadi perhatian Dewan. RSBI dan SBI merupakan amanat UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu telah berlangsung sejak tahun 2006, namun dalam pelaksanaannya hingga kini masih ditemukan berbagai permasalahan di antaranya lemahnya pengawasan pengelolaan dana, serta masih terbatasnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi serta kompetensi pembelajaran *bilingual* (dua bahasa). Dalam hal ini Dewan berpendapat, perlu dilakukan pengawasan dengan saksama, baik yang berkaitan dengan mutu tenaga pendidik maupun pengelolaan dana. Selama ini, pengelolaan dana di sekolah-sekolah tersebut kurang terbuka, karena menggunakan sistem *block grant*.

Satu masalah yang masih ditangani oleh Dewan, berkaitan dengan belum tuntasnya keputusan tentang **Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**. Kalangan Dewan berkeinginan agar BPIH ini segera dapat diputuskan dalam rangka

kepastian bagi masyarakat tentang berapa angka definitif yang diperlukan untuk ibadah haji.

Sejak awal, Komisi VIII DPR serius membahas kemungkinan penurunan biaya haji dengan pendekatan perhitungan yang paling rasional. Hal ini dimaksudkan semata-mata bagi perbaikan pelayanan kepada jamaah haji dengan memperhitungkan beban operasional, termasuk perbandingan dengan biaya haji di negara-negara tetangga. Oleh karena itu, Pimpinan Dewan mendesak agar Komisi Dewan dan Pemerintah segera melakukan bahasan kembali, agar masalah ini cepat terselesaikan.

Menteri Agama harus melakukan terobosan agar antrian calon jamaah haji yang sudah demikian panjang dapat segera terselesaikan, apakah dengan **menambah kuota** ataukah **secara tegas melarang** bagi mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji berkali-kali.

Berbagai **kecelakaan angkutan darat**, khususnya Kereta Api benar-benar menyita perhatian kita. Beberapa hari yang lalu, telah terjadi kecelakaan Kereta Api Logawa Madiun yang menimbulkan korban jiwa dan puluhan penumpang luka-luka karena tiga rangkaian gerbong terguling di perbukitan yang cukup curam. Kita meminta perhatian Pemerintah dan PT Kereta Api mengenai seringnya terjadi kasus kecelakaan kereta api, termasuk kecelakaan di perlintasan kereta api yang memakan korban jiwa. Menghadapi hari-hari besar keagamaan, khususnya Idul Fitri, maka kesiapan PT. Kereta Api harus benar-benar ditingkatkan, jangan hanya mementingkan kenaikan tarif tanpa meningkatkan pelayanan, keamanan dan keselamatan penumpang. Kepada Komisi V, Pimpinan Dewan mengharapkan agar masalah ini dapat ditindaklanjuti dalam forum rapat kerja atau rapat dengar pendapat.

Menghadapi ramadhan dan Idul Fitri, Dewan meminta perhatian terhadap makin beratnya beban kehidupan rakyat dengan **meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok**. Kenaikan harga bahan pokok ini dipicu oleh kenaikan tarif dasar listrik yang berlaku mulai 1 Juli, rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi, dan kenaikan harga gas. Oleh karena itu, Pemerintah harus menaruh perhatian mengenai hal ini dan melakukan operasi pasar agar harga sembilan bahan pokok (sembako) dapat terkendali.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Masa Sidang III, Dewan dan Pemerintah telah melakukan pembahasan tentang **Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal** dalam rangka penyusunan RAPBN 2011. RAPBN 2011 menggambarkan arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014. Secara garis besar, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011 berisikan tiga hal pokok, yaitu: (i) Kinerja Perekonomian tahun 2009 dan proyeksi ekonomi tahun 2010; (ii) Tantangan dan sasaran ekonomi makro tahun 2011; dan (iii) Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2011. Secara substansi, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2011 disusun dengan berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011.

Secara umum, kinerja perekonomian dunia menunjukkan sinyal perbaikan, meskipun masih penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, Indonesia harus terus menjaga agar kebijakan ekonominya disusun dengan kehati-hatian dimana instrument makro-ekonomi ditujukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi untuk jangka panjang. Kendala struktural harus diatasi melalui kebijakan reformasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah pada masa sidang yang lalu, telah disepakati beberapa hal antara lain; pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,1 persen - 6,4 persen; Inflasi pada kisaran 4,9 persen - 5,3 persen; Kurs Rupiah pada kisaran Rp 9.100 - Rp 9.400 per dollar AS; Suku Bunga SBI 3 bulan pada kisaran 6,2 persen - 6,5 persen; Harga minyak mentah per barel pada kisaran \$ 75 - \$90; dan *Lifting* minyak mentah pada kisaran 960.000 - 975.000 barel per hari.

Dalam kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi 2011, sebagian besar Fraksi memberi pandangan bahwa target pertumbuhan 2011 sebesar 6,6-7% optimis dapat dicapai, mengingat antara lain: potensi dan perkembangan positif ekonomi domestik, stabilitas ekonomi makro dan moneter yang terjaga dengan baik, serta berbagai indikator positif lainnya. Dewan akan membahasnya secara komprehensif melalui Badan Anggaran DPR-RI. Sebagaimana diketahui, realisasi pertumbuhan ekonomi (PDB) pada Triwulan I/2010 dapat dicapai sebesar 5,7 persen. Target pertumbuhan ekonomi pada APBN 2010 ditetapkan sebesar 5,5 persen. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 dicapai sebesar 4,4 persen. Dewan

mengingatkan Pemerintah agar memperhatikan masukan, pendapat, saran dan pandangan Dewan terkait RAPBN 2011.

Beberapa dari 11 prioritas nasional tahun 2011 yang perlu didalami lebih lanjut oleh Dewan adalah: Penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; reformasi birokrasi dan pelaksanaan *good and corporate governance*; masalah infrastruktur; peningkatan investasi dan iklim usaha melalui perbaikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur.

Terkait dengan pelaksanaan APBN 2010 yang sedang berjalan, segenap Anggota Dewan diminta untuk memonitor dan mengawasi berbagai kebijakan pemerintah apakah sesuai dengan RKP 2010 dan RPJMN 2010-2014.

Sidang Dewan yang terhormat,

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah **peningkatan produksi minyak dan gas bumi**. Dewan mendesak Pemerintah agar menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi migas. Dewan menilai produksi minyak (*lifting*) sebenarnya dapat menembus angka 1 juta barrel per hari. Untuk itu, Dewan mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan RPP tentang *Cost Recovery* dan pemberian *insentif fiskal* seperti, PPN dan Bea Masuk pada kegiatan hulu eksplorasi migas.

Maraknya peristiwa ledakan tabung gas elpiji ukuran 3 kg beberapa bulan terakhir ini yang menelan korban jiwa, dan harta benda, membawa keprihatinan yang sangat mendalam sekaligus kekecewaan. Terungkapnya data kepolisian bahwa sekitar 200 ribu tabung gas elpiji 3 kg yang tidak memenuhi standar dan telah beredar ke masyarakat, memperkuat hasil penelitian Badan Standarisasi Nasional. Bahwa lebih dari 60% tabung yang beredar di masyarakat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah dan Pertamina tidak boleh lepas dari tanggungjawab terhadap masalah ini. Masyarakat menilai bahwa konversi minyak tanah ke gas (*Liquid Petroleum Gas*) tidak dipersiapkan dengan baik, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat belum berjalan baik. Dilakukannya penggantian asesori komponen yang rusak, seperti selang, katup dan regulator oleh Pertamina yang harus dibeli dengan harga yang ditetapkan pemerintah, masih mengundang pertanyaan. Bahkan, kalangan Dewan meminta bahwa tabung gas yang tidak sesuai SNI harus ditarik dan perlu dilakukan investigasi sebelum diedarkan kembali kepada masyarakat.

Terkait dengan persoalan kebutuhan terhadap **supply gas bumi untuk sektor industri dan sektor energi** (proyek pembangkit listrik), Pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Dewan menilai, Indonesia masih memiliki banyak cadangan gas bumi (*proven reserves*). Untuk itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk menjual gas bumi (*Liquid Natural Gas*) ke luar negeri, termasuk dalam kasus proyek Gas Bumi Donggi-Senoro. Beberapa sub-sektor industri dan pembangkit listrik masih membutuhkan gas bumi untuk menggerakkan mesin. Oleh karena itu, Dewan tetap minta untuk dilakukan pendekatan politik kepentingan bangsa dan negara atas pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam waktu dekat Dewan akan mensinkronkan kebijakan pengelolaan migas untuk kepentingan bangsa dan negara dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam mempercepat pembangunan ekonomi, Presiden telah membentuk Komite Ekonomi Nasional (KEN) melalui Perpres Nomor 31 tahun 2010. Komite ini hendaknya dapat membuat terobosan-terobosan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, seperti upaya meningkatkan investasi asing, bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, mempercepat penciptaan lapangan kerja, mencapai ketahanan energi, pangan dan air, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Komite Ekonomi Nasional harus berani mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sinkron dan tumpang-tindih satu sama lain, serta mampu merekomendasikan hal-hal yang sangat strategis bagi pembangunan. Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, baik pusat maupun daerah. Presiden juga telah menerbitkan Inpres Nomor 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Pembentukan badan-badan baru ini, senantiasa akan dipantau oleh Dewan, baik berkaitan dengan urgensi maupun hasil yang dicapai.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan bidang luar negeri, perlu kami sampaikan bahwa pada masa reses yang lalu sejumlah kegiatan telah dilakukan dan diikuti oleh DPR-RI dalam kerangka pelaksanaan *parliamentary diplomacy*, terutama melalui forum keparlemenan

internasional. Kegiatan tersebut antara lain adalah kehadiran Ketua DPR RI dan delegasi BKSAP pada *Extraordinary Session of the PUIC Conference* yang berlangsung di Damaskus, Syria, pada akhir Juni. Sidang yang mengambil tema "*Lifting the Blockade of Gaza*" itu, telah membahas berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dari penindasan Israel.

Posisi Indonesia adalah tegas, bahwa penjajahan Israel atas tanah-tanah Arab yang diduduki harus segera dihentikan, termasuk dihentikannya blokade Israel atas Gaza. Dalam kaitan ini, sejumlah Anggota DPR-RI Komisi I, dipimpin oleh Ketua DPR-RI, pada akhir bulan Juni telah mengunjungi Gaza. Pada kesempatan ini, Ketua DPR-RI secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Al Royan Gaza Utara, yang direncanakan sebagian akan dibiayai Pemerintah Indonesia sejumlah 2 juta dollar. Kegiatan lainnya adalah digelarnya pertemuan delegasi Parlemen Indonesia dengan Parlemen Palestina. Kita semua berharap agar kunjungan delegasi DPR RI ini benar-benar membawa manfaat bagi upaya perdamaian yang sangat didambakan oleh Rakyat Palestina.

Dalam kesempatan kunjungan Komisi I ke Timur Tengah, delegasi juga telah mengunjungi Markas Indobatt di Lebanon untuk bertemu dengan kontingen Garuda Indonesia yang sedang melakukan tugas perdamaian di Lebanon Selatan. Kedatangan delegasi disambut dengan penuh semangat dan antusias oleh kontingen Garuda Indonesia.

Pada masa reses yang lalu, DPR-RI juga telah berpartisipasi dalam sidang *Sub-Committee on Protecting and Respecting Cultural Diversity in Asia*, yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, tanggal 5-6 Juli 2010. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai Presiden *Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED)*, pada tanggal 6-7 Juli 2010, DPR-RI telah menyelenggarakan *The First Plenary Session of General Assembly of FASPPED* di Jakarta. Sidang FASPPED tersebut telah menghasilkan Deklarasi *Jakarta Action Plan*, berisi rencana aksi parlemen negara-negara Asia Pasifik untuk mempercepat realisasi Pendidikan untuk semua (*Education for All (EFA)*) sebagaimana yang digagas oleh UNESCO.

Perlu juga kami sampaikan bahwa pada masa sidang ini, sekitar minggu ketiga bulan Juli, DPR-RI juga akan menghadiri Konferensi ke-3 para Ketua Parlemen Se-Dunia (*The Third World Conference of Speakers of Parliament*) di Jenewa, Swiss. Konferensi ini diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun dan biasanya mengambil tema

yang berkaitan dengan peran penting parlemen dalam merespons berbagai isu global dan kerjasamanya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tema konferensi kali ini adalah "*Parliaments in a world of crisis: securing global democratic accountability for the common good*". Konferensi ini merupakan forum yang tepat bagi parlemen Indonesia untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan nasional terutama di bidang ekonomi dan politik serta isu-isu strategis lainnya, seperti isu perubahan iklim, energi, selain menginformasikan kemajuan Indonesia dalam memajukan demokrasi.

Dewan juga akan menerima kunjungan tamu-tamu parlemen luar negeri dari negara-negara sahabat sebagai bagian dari kegiatan diplomasi parlemen. Pimpinan Dewan senantiasa berharap bahwa kegiatan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI, baik itu ketika berinteraksi dengan anggota parlemen negara sahabat maupun dalam kerangka menghadiri pertemuan-pertemuan organisasi antar-parlemen internasional, kiranya dapat melengkapi dan memperkuat diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok rencana kegiatan dan pandangan Dewan terhadap berbagai permasalahan aktual yang terjadi selama masa reses. Selanjutnya, Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas dalam Masa Sidang IV, mengoptimalkan tugas-tugas yang berkaitan dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan menjadi perhatian utama untuk Masa Sidang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 12 Juli 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. H. MARZUKI ALIE